

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang Diklat PNS mengandung pengertian berupa proses penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat PNS ini dilakukan untuk mencapai daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, diadakanlah pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan pada pegawai.

Diklat teknis bidang umum/ administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan dan diklat teknis substantif merupakan ketrampilan dan aatau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi serta mampu berperan dalam menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

[illegible]

G. KELUARAN

Keluaran kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal yaitu :

- Bagi organisasi yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan kegiatan tepat, meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi, dan mendorong sikap keterbukaan manajemen.
- Bagi individu yaitu meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai dimana pegawai mempelajari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), memotivasi pegawai untuk bekerja yang lebih baik, meningkatkan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, frustrasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri.
- Bagi kelompok kerja yaitu terjadinya proses komunikasi yang efektif, terciptanya iklim kerja yang baik, adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan ketaatan semua pihak terhadap berbagai ketentuan.

H. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal Biro Organisasi Dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Semarang,

KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661016 199203 2 006